

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh daerah masing-masing sesuai otonomi daerah yang mengiringinya. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Tindak lanjut oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang adapada Pemerintah Daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) sebagai perencanaan yang bersifat tahunan dengan mendasarkan pada RKPD sebagai salah satu pedomannya.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal. Dalam proses pembangunan, sumberdaya yang dimiliki berusaha untuk dimanfaatkan seefektif dan semaksimal mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Kualitas perencanaan memegang peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan proses pembangunan. Sedangkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai penjabaran RPJPD dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) setiap tahun anggaran.

Sedangkan Perangkat Daerah (PD) menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPN 2005-2025 mengamanatkan pencapaian visi "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Sementara itu visi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 adalah Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari. Sedangkan visi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam RPJPD Kabupaten Pemalang 2005-2025 adalah Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Secara umum amanat yang dikandung dalam visi pembangunan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah maupun pembangunan nasional merupakan wujud dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai UUD 1945.

RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 saat ini memasuki tahap kelima periode tahun 2021-2025 dengan fokus pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Demikian pula dengan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 yang saat ini memasuki tahapan lima tahun kelima (tahun 2021-2025) dengan prioritas pembangunan daerah pada fokus :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur;

4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dalam rangka menyusun arah dan kebijakan Perangkat Daerah tahun anggaran 2023, setiap tahunnya Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Arah dan kebijakan Perangkat Daerah tersebut disusun melalui prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan unsur penunjang urusan pemerintahan sekretariat daerah yang diampunya. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2023 guna mendukung kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk :

- 1) Memberikan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

- 2) Memberikan arah dan pedoman bagi semua *stakeholders* pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam pada tahun 2023 dapat tercapai.

### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah untuk :

- a. Memberikan acuan bagi para *stakeholders* di Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pada tahun 2023 guna menunjang pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama tahun 2023 bagi para *stakeholders* Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
- c. Memberikan arah dan tujuan bagi para *stakeholders* Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2023 guna mencapai tujuan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah

#### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menyajikan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program Kegiatan dari Masyarakat.;

#### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, dan Program dan Kegiatan.

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB V PENUTUP

### BAB II

#### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

##### 2.1 Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021

**Anggaran Belanja** yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 47.713.478.400,00 (Empat puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, terealisasi sebesar Rp.

42.679.119.438,00 (Empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sebesar 89,46 % dengan perincian :

**1. Belanja Tidak Langsung**

**Belanja Tidak Langsung** Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan belanja atas Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang serta Gaji dan Tunjangan PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat KPU Kabupaten Pemalang.

Pada tahun 2021 Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 16.492.939.000,00 (Enam belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 15.301.862.152,00 (Lima belas milyar tiga ratus satu juta delapan ratus enam puluh duaribu seratus lima puluh duarupiah) atau sebesar 92,77% dengan perincian :

**a. Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati**

Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang sebesar Rp. 635.318.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 621.478.716,00 (enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) atau sebesar 97,82%

**b. Gaji dan Tunjangan PNS Sekretariat Daerah**

Gaji dan Tunjangan PNS pada Sekretariat Daerah maupun Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 20.224.975.000,00 (dua puluh milyar dua ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 20.036.656.017,00 (dua puluh milyar tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh belas rupiah) atau sebesar 98,79%.

**2. Belanja Langsung**

**Belanja Langsung** Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2021, Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 26.796.320.400,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tiga rtus dua puluh ribu empat ratus rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 22.081.182.055,00 (dua puluh dua milyar delapan puluh satu juta serratus delapan puluh dua ribu lima puluh lima rupiah) atau sebesar 82,40%.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Setda Kabupaten Pematang Jaya**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.								
4.01.	Sekretariat Daerah								
4.01.01.	Program Administrasi Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana.	59,59	Na	Na	Na	57,87	57,87	97,11
4.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.	83	Na	Na	Na	82,5	82,5	99,40
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Cetak Buku Perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPPA).	600	120	120	100%	120	240	40,00
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen LKJIP Setda dan Perjanjian Kinerja Setda Kab. Pematang Jaya	3	2	2	100%	3	5	166,67
4.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan,	83	Na	Na	Na	82,5	82,5	99,40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		<b>dan BMD lingkup sekretariat.</b>							
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah bulan terlaksananya fasilitasi Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi ASN.	70	14	14	100%	14	28	40,00
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.	Jumlah bulan terlaksananya fasilitasi Penatausahaan keuangan Perangkat daerah.	60	12	12	100%	12	24	40,00
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun setda.	5	2	2	100%	1	3	60,00
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD.	Jumlah buku Laporan semesteran yang tersedia.	5	2	2	100%	1	3	60,00
<b>4.01.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>83</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>	<b>99,40</b>
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Dokumen buku RKBMD Setda yang tersusun.	24	2	2	100%	20	22	91,67



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
<b>4.01. 01. 2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>83</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>	<b>99,40</b>
4.01. 01. 2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah Pakaian dinas yang tersedia.	497	472	472	100%	297	769	154,73
4.01. 01. 2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Jumlah pegawai yang terfasilitasi urusan kepegawaiannya.	250	50	50	100%	50	100	40,00
4.01. 01. 2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi guna peningkatan kompetensi pegawai.	135	70	70	100%	50	120	88,89
		Jumlah peserta yang mengikuti workshop guna peningkatan kompetensi pegawai.	135	48	48	100%	50	98	72,59
4.01. 01. 2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek.	34	0	0	0%	13	13	38,24
<b>4.01. 01. 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>83</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>	<b>99,40</b>
4.01. 01. 2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah bulan tersedianya peralatan untuk	60	12	12	100%	12	24	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
	Penerangan Bangunan Kantor.	penerangan bangunan kantor.							
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah bulan tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.	60	12	12	100%	12	24	40,00
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah bulan terfasilitasinya penyediaan peralatan rumah tangga.	60	12	12	100%	12	24	40,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah bulan terfasilitasinya penyediaan bahan logistik kantor.	60	12	12	100%	12	24	40,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jenis barang cetakan yang tersedia.	48	8	8	100%	10	18	37,50
		Jumlah Penggandaan yang tersedia.	100.120	36.000	36.000	100%	40.120	76.120	76,03
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bahan Bacaan Setda yang tersedia.	7.500	1.500	1.500	100%	1.500	3.000	40,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah bulan terlaksananya pelayanan fasilitasi kegiatan kunjungan tamu.	60	12	12	100%	12	24	40,00
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah bulan terfasilitasinya pelaksanaan rakor dan	60	12	12	100%	12	24	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		konsultasi di dalam dan luar daerah.							
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>83</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>	<b>99,40</b>
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan.	21	5	5	100%	9	14	66,67
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel.	Jumlah jenis Mebeler yang diadakan.	17	3	3	100%	5	8	47,06
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Kantor Lainnya yang diadakan.	17	3	3	100%	5	8	47,06
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>83</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>	<b>99,40</b>
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah bulan terfasilitasinya penatausahaan persuratan dinas.	60	12	12	100%	12	24	40,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah bulan tersedianya fasilitas pemenuhan kebutuhan jasa, listrik, telepon, air, internet.	60	12	12	100%	12	24	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah bulan jasa peralatan kantor yang tersedia.	60	12	12	100%	12	24	40,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah bulan terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan jasa kantor.	60	12	12	100%	12	24	40,00
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>83</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>	<b>99,40</b>
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Dinas atau jabatan yang terfasilitasi pemeliharaannya dan perijinannya.	30	6	6	100%	6	12	40,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan dinas yang terfasilitasi peliharaan dan perijinannya.	825	165	165	100%	165	330	40,00
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel.	Jumlah Jenis Mebeler yang dipelihara.	30	4	4	100%	5	9	30,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah luasan gedung kantor yang terpelihara.	392	12	12	100%	136	148	37,76

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah bulan terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor.	60	12	12	100%	12	24	40,00
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>83</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>	<b>99,40</b>
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah bulan terfasilitasinya penyediaan gaji dan tunjangan KDH dan WKDH.	60	12	12	100%	12	24	40,00
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah Pakaian dinas KDH/WKDH yang tersedia.	1.400	50	50	100%	300	350	25,00
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah bulan tersedianya Fasilitas perawatan kesehatan KDH/WKDH.	60	0	0	0%	12	12	20,00
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat.</b>	<b>83</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>	<b>99,40</b>
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.	Jumlah bulan tersedianya pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.	60	12	12	100%	12	24	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.	Jumlah bulan tersedianya pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.	60	12	12	100%	12	24	40,00
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.	Jumlah bulan tersedianya pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.	60	12	12	100%	12	24	40,00
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Indeks Organisasi.</b>	<b>1,916</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>1,504</b>	<b>1,504</b>	<b>78,50</b>
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.	Jumlah dokumen Anjab dan Evajab yang tersusun.	7	2	2	100%	2	4	57,14
		Jumlah Dokumen kelembagaan yang tersusun.	10	2	2	100%	2	4	40,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Dokumen Laporan Pembinaan Pelayanan Publik.	5	1	1	100%	1	2	40,00
		Jumlah dokumen hasil SKM yang tersusun.	10	2	2	100%	1	3	30,00
		Jumlah Dokumen Perbup tentang ketatalaksanaan yang tersusun.	5	1	1	100%	1	2	40,00
		Jumlah KTP PNS yang dicetak.	7.500	1.000	1.000	100%	1.500	2500	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang terlaksana.	5	1	1	100%	1	2	40,00
4.01. 01. 2.13. 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Jumlah dokumen capaian kinerja triwulan Organisasi Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu.	39	32	32	100%	32	32	82,05
		Jumlah dokumen capaian Reformasi Birokrasi triwulan Organisasi Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu.	39	32	32	100%	32	32	82,05
		Jumlah OPD yang mendapat pendampingan pelaksanaan SAKIP.	41	41	41	100%	41	41	100,00
		Jumlah OPD yang mendapat pendampingan pelaksanaan RB.	41	41	41	100%	41	41	100,00
4.01. 01. 2.13. 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Jumlah dokumen evaluasi SOP yang tersusun.	5	1	1	100%	1	2	40,00
		Jumlah dokumen proses bisnis yang tersusun.	5	1	1	100%	1	2	40,00
		Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi pelayanan TNDE yang tersusun.	5	1	1	100%	1	2	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.	Jumlahn dokumen laporan capaian RB Kabupaten yang tersusun.	5	1	1	100%	1	2	40,00
		Jumlah dokumen LkjIP Kabupaten yang tersusun tepat waktu.	5	1	1	100%	1	2	40,00
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.</b>	<b>Persentase terlaksananya Fasilitasi keprotokol dan komunikasi pimpinan.</b>	<b>100</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91,00</b>
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokol.	Jumlah Kegiatan KDH/WKDH yang terfasilitasi.	1.750	350	350	100%	350	700	40,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan.	Jumlah Materi/naskah Sambutan Pimpinan Yang Tersusun.	1.750	350	350	100%	350	700	40,00
		Jumlah Buku Katalog Sambutan Pimpinan Yang Tersusun.	184	20	20	100%	20	40	21,74
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan.	Jumlah Kegiatan KDH/ WKDH Yang Terdokumentasi.	1.750	350	350	100%	350	700	40,00
		Jumlah buku notulensi hasil rapat .	205	Na	Na	Na	41	41	20,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
4.01. 02.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana.	94,4	Na	Na	Na	91,93	91,93	97,38
4.01. 02. 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan.	Persentase terlaksananya administrasi pemerintahan.	100	Na	Na	Na	100	100	100,00
4.01. 02. 2.01. 01	Penataan Administrasi Pemerintahan.	Jumlah data monografi semesteran yang tersusun.	10	2	2	100%	2	4	40,00
		Jumlah fasilitasi kegiatan PAW anggota DPRD Kab. Pematang.	5	1	1	100%	1	2	40,00
		Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).	70	14	14	100%	14	28	40,00
		Jumlah Kelurahan yang diberikan pembinaan dan pengawasan penggunaan dan alokasi kelurahan.	46	11	11	100%	2	13	28,26
		Jumlah rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.	20	4	4	100%	4	8	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.	Jumlah Nama Rupabumi yang dibakukan.	25	8	8	100%	5	13	52,00
		Jumlah pilar batas daerah yang dipelihara.	45	10	10	100%	10	20	44,44
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	Jumlah dokumen evaluasi SPM yang tersusun.	5	1	1	100%	1	2	40,00
		Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun.	5	1	1	100%	1	2	40,00
		Jumlah dokumen LPPD yang tersusun.	5	1	1	100%	1	2	40,00
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.</b>	<b>Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat.</b>	<b>94</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>	<b>97,66</b>
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan.	25	Na	Na	Na	5	5	20,00
		Jumlah terlaksananya pembinaan keagamaan terhadap ASN.	60	Na	Na	Na	12	12	20,00
		Jumlah terlaksananya pembinaan lembaga keagamaan.	30	Na	Na	Na	6	6	20,00
		Jumlah terlaksananya fasilitasi rakor dan monev keagamaan.	20	Na	Na	Na	4	4	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Jumlah jenis fasilitasi pemberian bantuan sosial/hibah keagamaan.	10	Na	Na	Na	2	2	20,00
4.01. 02. 2.02. 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.	Terlaksananya rakor, monev dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dan sosialisasi/pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan.	25	1	1	100%	5	6	24,00
4.01. 02. 2.02. 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.	Terlaksananya rakor dan monev penanggulangan kemiskinan.	20	1	1	100%	4	5	25,00
<b>4.01. 02. 2.03</b>	<b>Fasilitasi dan koordinasi Hukum.</b>	<b>Persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat.</b>	<b>100</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84,00</b>
4.01. 02. 2.03. 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi pelayanan E core yang tersusun.	5	Na	Na	Na	1	1	20,00
		Jumlah pra raperda menjadi Raperda di Eksekutif.	75	12	12	100%	15	27	36,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Jumlah produk hukum daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi.	3.970	780	780	100%	785	1.565	39,42
		Jumlah prompemperda yang disusun dalam 1 tahun.	5	1	1	100%	1	2	40,00
		Jumlah Raperda menjadi Perda dalam 1 tahun.	75	12	12	100%	15	27	36,00
		Jumlah sosialisasi Rancangan produk Hukum Daerah.	10	2	2	100%	2	4	40,00
4.01. 02. 2.03. 02	Fasilitasi Bantuan Hukum.	Jumlah Desa Sadar Hukum yang dibentuk.	70	0	0	0%	14	14	20,00
		Jumlah Kelompok Kadarkum yang dibentuk/dibina.	18	6	6	100%	6	12	66,67
		Jumlah Kelompok Peserta Lomba Kadarkum.	70	0	0	0%	14	14	20,00
		Jumlah laporan data peduli HAM yang disusun.	5	0	0	0%	1	1	20,00
		Jumlah Laporan pelaksanaan aksi HAM yang disusun.	15	3	3	100%	3	6	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Jumlah legal opinion dalam satu tahun.	10	2	0	0%	2	2	20,00
		Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani.	60	12	12	100%	12	24	40,00
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aksi HAM dan Kabupaten/Kota peduli HAM.	225	45	45	100%	45	90	40,00
		Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara.	15	2	0	0%	3	3	20,00
		Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara bagi masyarakat miskin.	26	4	0	0%	4	4	15,38
		Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundangundangan di desa dalam 1 tahun.	15	0	0	0%	3	3	20,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.	Buku Referensi.	175	10	10	100%	25	35	20,00
		Jumlah buku produk hukum daerah yang dicetak.	45.000	9.000	9.000	100%	9.000	18.000	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Jumlah kegiatan sosialisasi Produk Hukum Daerah dalam 1 tahun.	140	14	14	100%	28	42	30,00
		Jumlah kelompok peserta lomba dalam penyuluhan hukum.	70	0	0	0%	14	14	20,00
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang dikaji.	25	5	5	100%	5	10	40,00
		Jumlah produk hukum yang dipublikasikan.	200	40	40	100%	40	80	40,00
		Jumlah publikasi di media masa.	75	8	8	100%	15	23	30,67
		Pameran JDIH.	5	0	0	0%	1	1	20,00
		Rakor JDIH Tingkat Kabupaten.	10	2	2	100%	2	4	40,00
		Sosialisasi JDIH untuk Desa.	20	0	0	0%	4	4	20,00
<b>4.01. 02. 2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah.</b>	<b>Persentase terlaksananya fasilitasi kerjasama dan sinergi daerah.</b>	<b>100</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
4.01. 02. 2.04. 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	Jumlah Naskah Kerjasama Daerah/Sinergi yang tersusun.	70	15	15	100%	15	30	42,86

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Jumlah Data Penggalan / Pemetaan Kerja Sama Daerah .	5	1	1	100%	1	2	40,00
		Jumlah Koordinasi Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan.	20	4	4	100%	4	8	40,00
		Jumlah Sosialisasi regulasi yang mengatur kerjasama daerah/sinergi.	5	0	0	0%	1	1	20,00
		Jumlah regulasi yang mengatur kerjasama daerah/sinergi.	5	0	0	0%	1	1	20,00
4.01. 02. 2.04. 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri.	Jumlah MoU yang tersusun.	4	Na	Na	Na	0	0	0,00
4.01. 02. 2.04. 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah/Sinergi.	5	1	1	100%	1	2	40,00
<b>4.01. 03.</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan.</b>	<b>Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana.</b>	<b>72,13</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>66,47</b>	<b>66,47</b>	<b>92,15</b>
4.01. 03. 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah.	78,6	Na	Na	Na	77,8	77,8	98,98

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.	Jumlah koordinasi Pemantauan terhadap kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.	140	14	14	100%	28	42	30,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	Jumlah kormonevlap DBHCHT yang terselenggara.	60	12	12	100%	12	24	40,00
		Jumlah Rakor Ekuinda dan kormonevlap Ekuinda yang terselenggara.	30	6	6	100%	6	12	40,00
		Jumlah Rakor TPID dan kormonevlap TPID yang terselenggara.	30	6	6	100%	6	12	40,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil.	Jumlah kormonevlap perkoperasian dan UMKM yang terselenggara.	30	6	6	100%	6	12	40,00
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi pembangunan daerah.</b>	<b>71,11</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>64,07</b>	<b>64,07</b>	<b>90,10</b>
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun.	7	3	3	100%	2	5	71,43
		Jumlah dokumen penetapan kinerja dan	24	4	4	100%	4	8	33,33



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		evaluasi kinerja yang tersusun.							
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.	Jumlah dokummen ASB yang tersusun.	5	1	1	100%	1	2	40,00
		Jumlah dokumen standarisasi harga yang tersusun.	15	3	3	100%	3	6	40,00
		Jumlah dokumen standarisasi tempat kerja.	1	0	0	0%	0	0	0,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Jumlah laporan pengendalian pembangunan yang tersusun.	20	4	4	100%	4	8	40,00
		Jumlah paket pekerjaan fisik yang dimonitor.	300	Na	Na	Na	0	0	0,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Persentase terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa.	66,66	Na	Na	Na	55,56	55,55	83,33
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	Jumlah Fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi.	250	71	71	100%	50	121	48,40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Katalog elektronik lokal/sektoral yang tersedia.	3	Na	Na	Na	0	0	0,00
4.01. 03. 2.03. 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.	Jumlah Desk Rencana Umum Pengadaan.	10	2	2	100%	2	4	40,00
		Penayangan paket pengadaan barang dan jasa lewat LPSE..	1.030	71	71	100%	80	151	14,66
		Penyediaan layanan ISP untuk LPSE.	60	12	12	100%	12	24	40,00
		Sewa Colocation back up server LPSE.	5	1	1	100%	1	2	40,00
4.01. 03. 2.03. 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Desa di setiap Kecamatan.	70	Na	Na	Na	14	14	20,00
		Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Kab. Pemalang.	205	Na	Na	Na	41	41	20,00
		Penilaian angka kredit untuk pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa.	40	4	4	100%	8	12	30,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(6+8)	10=(9/4*100%)
		Peningkatan Kualitas Teknis Sekretariat dan Pokja UKPBJ.	100	25	25	100%	20	45	45,00
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.</b>	<b>Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan SDA.</b>	<b>78,6</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>Na</b>	<b>77,8</b>	<b>77,8</b>	<b>98,98</b>
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.	Jumlah kormonevlap kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.	60	12	12	100%	12	24	40,00
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.	Jumlah koordinasi, monev dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan dan LH yang terselenggara.	60	8	8	100%	12	20	33,33
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.	Jumlah koordinasi, monev, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan air.	60	12	12	100%	12	24	40,00

Berdasarkan tabel di atas, kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2021 termasuk sangat baik, mengingat banyak capaian realisasi kinerja mencapai 100%, dan ada beberapa kegiatan yang pencapaiannya di atasnya. Berikut adalah kegiatan yang pencapaiannya di atas 100% dan beberapa yang di bawah 80%.

## **2.2 Kegiatan Tahun 2021 dengan Pencapaian Kinerja Melebihi 100% dan Kurang dari 80%**

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara	2	0	Tidak ada permohonan fasilitasi bantuan hukum.
		Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara bagi masyarakat miskin	4	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada permohonan fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.</li> <li>• Pemberian bantuan hukum pada PN Pemalang, dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Tidak ada kantor LBH yang berkedudukan di Kabupaten Pemalang, dan hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk dilaksanakannya Kerjasama dalam fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.</li> </ul>

**Kegiatan Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II dengan Pencapaian Kinerja**

**Kurang dari 80%**

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi	760	291	minimnya jumlah permintaan produk hukum yang disinkronisasi dan diharmonisasi
		Jumlah Raperda menjadi Perda dalam 1 Tahun	12	0	Masih dalam proses pembahasan
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kelompok Kadarkum yang dibentuk	6	0	Akan dilaksanakan di Triwulan III
		Jumlah legal opinion dalam satu tahun	2	0	Tidak ada permohonan LO dari OPD
		Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara	3	0	Tidak ada perkara yang masuk
		Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara bagi masyarakat miskin	6	0	Tidak ada perkara yang masuk
		Jumlah Buku Referensi yang dibeli	40	0	Belum ada referensi buku yang akan dibeli
		Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dalam 1 tahun	14	3	Terkendala sistem penatausahaan
		Jumlah produk Hukum Daerah yang dikaji	10	4	Minimnya jumlah permintaan produk hukum yang dikaji
		Jumlah Produk Hukum Desa yang diklarifikasi	75	26	Minimnya jumlah permintaan produk hukum yang dimohonkan untuk diklarifikasi
3	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen hasil SKM yang tersusun	1	0	Sedang dalam proses penyusunan
		Jumlah Dokumen Perbup tentang ketatalaksanaan yang tersusun.	1	0	Menunggu Permrndagri 11 tahun 2020 revisi

Secara ringkas rincian anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang  
Tahun 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>47.713.478.400</b>	<b>42.685.773.638</b>	<b>89,46</b>
<b>1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>20.860.293.000</b>	<b>20.604.591.583</b>	<b>98,77</b>
	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	635.318.000	621.478.716	97,82
	Gaji dan Tunjangan PNS	20.224.975.000	19.983.112.867	98,80
<b>2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>26.853.185.400</b>	<b>22.081.182.055</b>	<b>82,23</b>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Pemalang, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang didasarkan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh 9 (sembilan) bagian yaitu :

1. Bagian Umum,
2. Bagian Organisasi,
3. Bagian Tata Pemerintahan,
4. Bagian Pembangunan,
5. Bagian Hukum,
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat,
7. Bagian Perekonomian dan SDA,
8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki Sembilan sasaran yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022**

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%			√	9,90	10,3	10,4	10,6	8,29	7,00			
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%			√	56,34	56,90	57	57,10	22,33	10,95			
	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pemerintahan dan kesra yang terlaksana	%		√		Na	91,93	91,27	93,13	61,67	32,63			
	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan yang terlaksana	%		√		Na	65,81	64,80	69,13	30,32	12,85			

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang administrasi umum yang terlaksana	%		√		Na	57,87	58,37	58,77	28,92	39,52			

Berdasarkan tabel di atas kinerja layanan pada Sekretariat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif, dengan target 10,3 % dan realisasi 7 % pada triwulan II tahun 2022. Realisasi yang tidak mencapai target disebabkan jumlah kapasitas keuangan yang tidak terlalu besar, sehingga pekerjaan dilakukan sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran. Oleh karena itu, pekerjaan dilakukan pada skala kecil sehingga proses pengadaannya melalui mekanisme Penunjukan Langsung.
- Rasio Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 56,34, realisasi kinerja tercapai sebesar 22,33. Tahun 2022 sebesar 56,90 dan realisasi kinerja 10,95% hingga triwulan II tahun 2022.
- Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pemerintahan dan kesra yang terlaksana, dengan target kinerja NA. Hal ini disebabkan indikator tersebut baru digunakan pada Renstra 2021 -2026, sehingga target awal baru dilaksanakan pada tahun 2022, dan pada tahun 2021 belum dilakukan penghitungan, mengingat kinerja tersebut banyak mendasarkan pada indeks kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan. Namun demikian, ada kinerja penyusun sasaran tersebut yang sudah dilaksanakan karena sudah merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga angka capaian kinerja sementara adalah 61,67. Pada tahun 2022 hingga triwulan kedua, capaian kinerja sementara adalah sebesar 32,63 dari target 91,93. Capaian yang masih rendah dikarenakan beberapa indikator ditargetkan terealisasi pada triwulan III dan triwulan IV.
- Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang perekonomian dan pembangunan yang terlaksana, dengan target kinerja NA. Hal ini disebabkan indikator tersebut baru digunakan pada Renstra 2021 -2026, sehingga target awal baru dilaksanakan pada tahun 2022, dan pada tahun 2021 belum dilakukan penghitungan, mengingat kinerja tersebut banyak mendasarkan pada indeks kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan. Adapun indikator kinerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021, maka diperoleh realisasi sebesar 30,32. Pada tahun 2022 hingga triwulan kedua capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan adalah sebesar 12,85 dari target 65,81. Capaian yang masih jauh dari target dikarenakan sebagian besar target indikator kinerja pada bidang ini dilakukan pada triwulan III dan triwulan IV
- Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang administrasi umum yang terlaksana, dengan target kinerja NA. Hal ini disebabkan indikator tersebut baru digunakan pada Renstra 2021 -2026, sehingga target awal baru dilaksanakan pada tahun 2022, dan pada tahun 2021

belum dilakukan penghitungan, mengingat kinerja tersebut banyak mendasarkan pada indeks kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan. Untuk indikator kinerja yang sudah terlaksana pada tahun 2021, diperoleh kinerja sementara sebesar 28,92. Pada Tahun 2022 hingga triwulan kedua, capaian kinerja pada urusan dibidang administrasi umum yang terlaksana yaitu sebesar 39,52 dari target 57,87. Indeks ini masih harus dipenuhi dengan laporan survey kepuasan masyarakat pada bagian umum dan prokompim yang akan dilaksanakan pada akhir tahun untuk dapat memenuhi target.

Adapun indikator kinerja yang tercantum pada Renstra 2016-2021 terdapat realisasi kinerja sebagai berikut:

- Nilai LPPD yang diperoleh adalah 3,2, hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian, kendala utama yang dihadapi adalah, belum diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait peringkat dan hasil evaluasi LPPD sejak tahun 2019. Nilai yang dicantumkan merupakan hasil evaluasi penyusunan LPPD 2018.
- Nilai evaluasi AKIP Setda, indikator ini tercapai 61,79 dari target 64. Target yang tidak tercapai karena masih ada rekomendasi yang belum dilaksanakan serta perbaikan indikator kinerja yang belum diselesaikan. Saran dan rekomendasi dari *reviewer* diakomodir dalam penyusunan Renstra 2021-2026 berupa perbaikan indikator, dan rekomendasi yang lain dipenuhi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah.
- Nilai SAKIP Komponen Pelaporan, pencapaian kinerjanya adalah 10,86 dari target 10. Pencapaian kinerja yang melebihi target disebabkan perangkat daerah semakin memahami pentingnya pelaporan kinerja dan pelaksanaan pendampingan secara intensif mampu memperbaiki kinerja penilaian SAKIP dari komponen pelaporan.
- Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik. Pencapaian kinerja indikator ini adalah 82,04 dari target 82. Pencapaian target yang melebihi 100% disebabkan adanya perbaikan sarana dan prasarana layanan maupun inovasi dalam pemberian layanan.
- Persentase kegiatan/ paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi, target yang ditetapkan adalah 3%, pencapaian sebesar 1,65%. Rendahnya pencapaian dikarenakan perubahan identifikasi terhadap paket pengadaan di RUP, semula paket pengadaan menggunakan pendekatan per kegiatan, sedangkan pada 2021 paket pengadaan dirinci sampai ke belanja, hal ini menyebabkan jumlah paket pengadaan menjadi lebih banyak. Selain itu jumlah dan kompetensi SDM yang terbatas juga turut menjadi permasalahan dalam pencapaian indikator ini.
- Akumulasi laba perusda per tahun, dengan target 8 Milyar, realisasi 25,5 Milyar. Pencapaian kinerja yang melebihi target disebabkan kinerja BUMD yang baik terutama di sektor perbankan dan keuangan. Sedangkan untuk sektor air minum masih ada profit namun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**



Pada tahun 2023 terdapat beberapa hal yang perlu segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dan menjadi fokus pelaksanaan pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah;
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur;
4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Terkait dengan hal tersebut, perencanaan seharusnya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi pada waktu mendatang sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan meningkat sesuai dengan tujuan bersama yaitu menuju *good governance* dan *clean government*. Terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Sekretariat Daerah perlu meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah, peran Sekretariat Daerah sangatlah besar terutama melalui fungsi koordinatif. Kerjasama dan sinergi menjadi salah satu kegiatan Sekretariat Daerah yang bisa memfasilitasi penyelesaian maupun percepatan pembangunan daerah. Hal tersebut dilaksanakan baik dengan pemerintah, baik pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun dengan swasta. Dalam urusan perekonomian, juga telah dilakukan koordinasi lintas sektoral untuk bisa meningkatkan kualitas dan pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam bidang penyusunan peraturan perundangan, sinergi dengan Lembaga Legislatif maupun instansi pemerintah lain, merupakan hal yang mutlak dilaksanakan guna mendukung terwujudnya sebuah peraturan daerah. Dalam bidang Kesra, sinergi dengan Lembaga Vertikal maupun Lembaga yang lain, telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pematang Jaya. Dalam bidang tata laksana organisasi, Kabupaten Pematang Jaya telah melaksanakan koordinasi yang intensif dengan pengampu maupun Pembina penyusun tata laksana organisasi pemerintah daerah, sehingga diharapkan akan terwujud sebuah Lembaga yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tuntutan pelayanan prima oleh masyarakat serta adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga membutuhkan sumber daya aparatur daerah yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Aparatur daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pribadi dan kinerjanya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat kesejahteraan aparatur daerah juga perlu diperhatikan. Diharapkan dengan diberlakukannya *reward and punishment*, yaitu pemberian penghargaan atau tambahan penghasilan bagi yang berprestasi atau yang memiliki beban kerja yang tinggi dan sanksi atau hukuman bagi yang melakukan pelanggaran, akan dapat meningkatkan kualitas pribadi aparatur dan kinerjanya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah antara lain:

1. Keterbatasan jumlah SDM serta perlunya peningkatan kompetensi SDM.
2. Sarana dan prasarana yang perlu diperbaharui maupun dilakukan penambahan untuk mendukung layanan publik.
3. Masih adanya ego sektoral, sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran daerah maupun perangkat daerah.

Dari Permasalahan tersebut, apabila tidak segera ditangani, dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, maupun indikator kinerja lain terutama yang bersifat makro dan melibatkan lintas sektoral. Namun demikian, dengan upaya keras dan optimalisasi fungsi koordinasi, diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Peningkatan fungsi koordinatif lintas sector inilah yang menjadi tantangan terbesar Sekretariat Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Diharapkan dengan struktur kelembagaan yang didalamnya sudah mencantumkan uraian tugas secara jelas dan pasti, akan memudahkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral. Selain itu dengan dukungan anggaran yang memadai, akan lebih memudahkan pelaksanaan fungsi koordinatif tersebut.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, isu-isu strategis yang muncul dan perlu mendapatkan perhatian Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

- Perlunya penambahan kuantitas dan peningkatan kompetensi SDM guna mendukung kelancaran dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya layanan prima kepada masyarakat.
- Belum optimalnya pencapaian tingkat/level kematangan UKPBJ Kabupaten Pematang Jaya.
- Belum optimalnya pemanfaatan Kerjasama/sinergi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pematang Jaya.
- Perlunya meningkatkan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk melakukan evaluasi penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan guna mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- Perlunya optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik untuk menciptakan layanan masyarakat yang efektif, efisien, dan bebas KKN, yang dicerminkan dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari isu-isu strategis dan permasalahan yang muncul sebagaimana tersebut di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang perlu memberikan perhatian dan prioritas dalam penyelesaiannya. Guna mendukung tercapainya prioritas penyelesaian isu – isu strategis dan permasalahan tersebut maka perlu disusun program dan kegiatan untuk merealisasikannya. Program dan kegiatan ini disusun dengan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, yang berdasarkan pemetaan mendukung terhadap pencapaian misi ke dua kepala daerah terpilih. Penyusunan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2022 mengacu pada program dan kegiatan tahun 2021 dan RKPD tahun 2022.

Review Rancangan awal RKPD tahun 2023 terhadap Hasil Analisa Kebutuhan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

**Nama Perangkat Daerah :** Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

NO					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6					
<b>4.01</b>					<b>Sekretariat Daerah</b>					<b>58.484.277.000</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>				<b>58.484.277.000</b>
4	01	01			<b>Administrasi Umum</b>	<b>Persentase terwujudnya peningkatan nilai penyelenggaraan pemerintahan urusan administrasi umum</b>	<b>58,37</b>	<b>38.848.268.212</b>	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Persentase terwujudnya peningkatan nilai penyelenggaraan pemerintahan urusan administrasi umum</b>	<b>58,37</b>	<b>38.757.903.236</b>			
4	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>135.364.976</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>45.000.000</b>			
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	45.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	45.000.000			
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.364.976	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0			
4	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0			

NO					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4	01	01	2,01		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>22.430.098.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>22.430.098.000</b>
4	01	01	2,01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	174 orang	22.161.328.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	174 orang	22.161.328.000
4	01	01	2,02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian atau verifikasi SKPD	200 Dokumen	250.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian atau verifikasi SKPD	200 Dokumen	250.000.000
4	01	01	2,02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	11.070.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	11.070.000
4	01	01	2,02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan atau triwulan atau semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran SKPD	1 Laporan	7.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan atau triwulan atau semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran SKPD	1 Laporan	7.700.000
4	01	01	2,02	05	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>9.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>9.000.000</b>

NO					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4	01	01	2,02	07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	9.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	9.000.000
4	01	01	2,03		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>466.897.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>466.897.000</b>
4	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4 paket	150.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4 paket	150.000.000
4	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 Dokumen	10.652.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 Dokumen	10.652.000
4	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	50 orang	252.985.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	50 orang	252.985.000
4	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	13 orang	53.260.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	13 orang	53.260.000
4	01	01	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>2.191.191.560</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>2.191.191.560</b>

NO					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	202.388.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	202.388.000
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	55.000.000
4	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	53.260.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	53.260.000
4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	39.930.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	39.930.000
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	125.575.260	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	125.575.260
4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9 Dokumen	205.848.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9 Dokumen	205.848.300
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	14 Laporan	499.990.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	14 Laporan	499.990.000
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1200 laporan	1.009.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1200 laporan	1.009.200.000
4	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>519.580.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>519.580.000</b>

NO					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	9 unit	91.320.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	9 unit	91.320.000
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel yang tersedia	200 unit	202.635.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel yang tersedia	200 unit	202.635.000
4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	250 unit	225.625.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	250 unit	225.625.000
4	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>4.455.422.700</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>4.455.422.700</b>
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	54.293.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	54.293.000
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik dan air yang disediakan	12 Laporan	1.357.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik dan air yang disediakan	12 Laporan	1.357.000.000
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	737.367.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	737.367.200
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.306.762.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	isu06.762.500



NO					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>1.998.531.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>1.998.531.000</b>
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	169.693.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	169.693.000
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	150 unit	700.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	150 unit	700.000.000
4	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	50 unit	105.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah mebel yang dipelihara	50 unit	105.000.000
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	851.838.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	851.838.000
4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	172.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	172.000.000

NO					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4	01	01	2,11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	82,6	1.123.818.000	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	82,6	1.123.818.000
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bula	785.318.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bula	785.318.000
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	250.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	250.000.000
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang mengikuti medikal cek up Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	2 orang	88.500.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang mengikuti medikal cek up Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	2 orang	88.500.000
4	01	01	2,12		<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	82,6	3.848.952.661	<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>		<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	82,6	3.848.952.661
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 paket	1.883.690.811	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 paket	1.883.690.811
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah peket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 paket	1.165.261.850	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah peket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 paket	1.165.261.850

NO					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4	01	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12 paket	800.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12 paket	800.000.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,13</b>		<b>Penataan Organisasi</b>		<b>Indeks Organisasi</b>	<b>1,612</b>	<b>1.066.662.000</b>	<b>Penataan Organisasi</b>		<b>Indeks Organisasi</b>	<b>1,612</b>	<b>1.066.662.000</b>
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	330.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	330.000.000
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	230.839.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	230.839.000
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	220.206.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	220.206.000
4	01	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	115.411.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	115.411.000
4	01	01	2,13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	170.206.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	170.206.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,14</b>		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Persentase terlaksananya fasilitasi keprotokolan</b>	<b>92</b>	<b>602.750.315</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Persentase terlaksananya fasilitasi keprotokolan</b>	<b>92</b>	<b>602.750.315</b>

NO					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
							<b>dan komunikasi pimpinan</b>					<b>dan komunikasi pimpinan</b>		
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	161.956.400	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	161.956.400
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	96.570.915	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	96.570.915
4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	344.223.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	344.223.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		<b>Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana</b>	<b>68,4</b>	<b>2.416.074.015</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		<b>Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana</b>	<b>68,4</b>	<b>2.506.438.991</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2,02</b>		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>		<b>Persentase terlaksananya administrasi pembangunan daerah</b>	<b>66,08</b>	<b>540.204.015</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>		<b>Persentase terlaksananya administrasi pembangunan daerah</b>	<b>66,08</b>	<b>630.568.991</b>
4	01	03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen	0			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 dokumen	90.364.976

NO					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
							Jumlah dokumen penetapan kinerja dan evaluasi kinerja yang tersusun	4 dokumen	0			Jumlah dokumen penetapan kinerja dan evaluasi kinerja yang tersusun	4 dokumen	
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	163.809.698	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	163.809.698
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	376.394.317	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	376.394.317
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2,01</b>		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>		<b>Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah</b>	<b>78</b>	<b>573.650.000</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>		<b>Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah</b>	<b>78</b>	<b>573.650.000</b>
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	275.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	275.000.000
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 Laporan	200.000.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 Laporan	200.000.000

NO					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	98.650.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	98.650.000
4	01	03	2,04		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>		<b>Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan SDA</b>	<b>78</b>	<b>202.220.000</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>		<b>Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan SDA</b>	<b>78</b>	<b>202.220.000</b>
4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, perikanan dan pertanian, dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal dan tenaga kerja	12 dokumen	84.220.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, perikanan dan pertanian, dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal dan tenaga kerja	12 dokumen	84.220.000
4	01	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik	4 dokumen	59.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik	4 dokumen	59.000.000

NO					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian	6 dokumen	59.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian	6 dokumen	59.000.000
4	01	03	2,03		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>Persentase terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa</b>	<b>61,11</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>Persentase terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa</b>	<b>61,11</b>	<b>1.100.000.000</b>
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 Dokumen	500.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 Dokumen	500.000.000
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	400.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	400.000.000
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	8 orang	200.000.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	8 orang	200.000.000

NO					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana</b>	<b>92,27</b>	<b>17.219.934.773</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana</b>	<b>92,27</b>	<b>17.219.934.773</b>
4	01	02	2,01		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>Persentase terlaksananya administrasi pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>374.567.904</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>Persentase terlaksananya administrasi pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>374.567.904</b>
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	85.824.048	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	85.824.048
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	101.864.976	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	101.864.976
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Laporan	186.878.880	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Laporan	186.878.880
4	01	02	2,02		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>92,4</b>	<b>15.332.600.869</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>92,4</b>	<b>15.332.600.869</b>
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	14.789.713.965	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	14.789.713.965



NO					RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	417.725.904	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	417.725.904
4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	125.161.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	125.161.000

NO					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
4	01	02	2,03		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>Persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat</b>	<b>84,4</b>	<b>1.262.766.000</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>Persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat</b>	<b>84,4</b>	<b>1.262.766.000</b>
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	12 Dokumen	343.428.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	12 Dokumen	343.428.000
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 kasus	475.565.550	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 kasus	475.565.550
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dokumen	443.772.450	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dokumen	443.772.450
4	01	02	2,04		<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya fasilitasi kerjasama dan sinergi daerah</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>		<b>Persentase terlaksananya fasilitasi kerjasama dan sinergi daerah</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	165.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	165.000.000
4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	60.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	60.000.000
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	25.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	25.000.000

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang No. 72 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah **“Membantu Bupati dalam Menyusun Kebijakan dan Mengkoordinasikan Perangkat Daerah”**.

Untuk penyusunan perencanaan tahun 2023 terdapat 85 usulan hasil penjangkaran aspirasi anggota DPRD Kabupaten Pematang yang diperoleh pada masa reses anggota DPRD. Aspirasi tersebut selanjutnya ditampung dan diinventarisir pada Sistem Informasi Perencanaan Daerah, yang selanjutnya akan dibahas usulan mana saja yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, tingkat urgensi dan kemendesakan untuk penanganan, dan kapasitas keuangan daerah. Dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan pada Sekretariat Daerah, maka hanya usulan yang bersifat bantuan sosial keagamaan dan bantuan sosial yang tidak tertampung pada perangkat daerah lain, yang akan difasilitasi pemberian bantuannya oleh Sekretariat Daerah.

**Tabel 2.5**

### **USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT TAHUN 2023 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				
<b>I.</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>				
1	Mushola Al Fatimah dukuh seri rt5 RW1	Widodaren, Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
2	Jamaah Yasin Tahlil Al Huda Desa Petanjungan RT.14/01	Desa Petanjungan Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
3	Jamaah Yasin Tahlil Nurul Iman Desa Petanjungan RT.03/01	Desa Petanjungan Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
4	Jamaah Yasin Tahlil Al Muttaqin Desa Petanjungan RT.06/02	Desa Petanjungan Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
5	Jamaah Yasin Tahlil Al Ikhlas Desa Petanjungan RT.02/02	Desa Petanjungan Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
6	Jamaah Yasin Tahlil Nurul Chasanah rt.09/02	Desa Petanjungan Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
7	Musholla Baiturrohim Rt02 RW01	Desa Petanjungan Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
8	Jamaah Yasin dan Tahlil Rumah Sedekah Jl Perwira no 12 RT2 RW 6	Kelurahan Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
9	Rehab Mushola Nurus Salam RT06 RW 02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
10	Pembangunan TPQ An Nisa RT3 RW4	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
11	Jam'iyah Yasin Tahlil Al Jannah rt2 RW5	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
12	Jam'iyah Yasin Tahlil Khoirunnisa RT7 RW4	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
13	Jam'iyah Yasin Tahlil al istiqomah Rt07/RW 04	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok	1 paket	

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
			masyarakat/ ormas		
14	Jam'iyah Yasin Tahlil Al Karomah RT08 RW 04	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
15	Jam'iyah Yasin Tahlil An Nisa RT05 RW 03	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
16	Jam'iyah Yasin Tahlil nurul hidayatul hasanah RT04 RW 02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
17	Jam'iyah Yasin Tahlil Maratussolihah Rt08 RW02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
18	Jam'iyah Yasin Tahlil nurul ikhlas rt08 RW03	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
19	Jam'iyah Yasin Tahlil Nurul Huda RT04 RW02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
20	Jam'iyah Yasin Tahlil Akhlakul Karimah rt07 RW 02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
21	Jam'iyah Yasin Tahlil Nurul Hikmah rt01 RW 02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
22	Jam'iyah Yasin Tahlil al hikmah RT04 RW 05	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
23	Jam'iyah Yasin Tahlil Baitussalam RT05 RW 02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
24	Rehab gedung Majelis taklim Al Muttaqin Jl Pisang RT 2 RW 8	Sewaka ,Pemalang	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
25	Rehab Masjid Raudhotul Muslimin Jl sumatera	Mulyoharjo, Pemalang	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
26	Komunitas Kampung Sehat RT 4 RW 1	Cibelok ,Taman	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
27	Bantuan sarana dan prasarana Komunitas Lansia Prima Jl Sulawesi 45	Mulyoharjo, Pemalang	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
28	Garuda Keadilan Pemalang Jl Perintis Kemerdekaan	Beji ,Taman	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
29	Komunitas Gerak Muda Jl pemuda Dalam RT 03 RW 07	Mulyoharjo,Pemalang	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
30	Jam'iyah Yasin Tahlil nurul huda rt06 RW03	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
31	Jam'iyah Yasin Tahlil al fatimah rt03 RW 03	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
32	Jam'iyah Yasin Tahlil nurul hidayah rt06 RW 04	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok	1 paket	

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
			masyarakat/ ormas		
33	Jam'iyah Yasin Tahlil hikmatu taklimah rt01 RW04	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
34	Jam'iyah Yasin Tahlil nurul khasanah rt05 RW04	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
35	Jam'iyah Yasin Tahlil mar"atusholehah rt04 RW 04	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
36	Jam'iyah Yasin Tahlil al qomar rt06 RW04	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
37	Jam'iyah Yasin Tahlil sabilul ihsan rt03 RW 05	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
38	Jam'iyah Yasin Tahlil nurul ihsan rt08 RW04	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
39	Jam'iyah Yasin Tahlil nurul hidayah rt01 RW02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
40	Jam'iyah Yasin Tahlil al hikmah rt01 RW03	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
41	Jam'iyah Yasin Tahlil qurota ayun RT05 RW03	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
42	Jam'iyah Yasin Tahlil al wahid rt03 RW03	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
43	Jam'iyah Yasin Tahlil al ikhlas rt03 RW03	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
44	Jam'iyah Yasin Tahlil annajah rt05 RW02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
45	Jam'iyah Yasin Tahlil khujatul islam rt01 RW02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
46	rt06 RW02 kendalsari	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
47	Jam'iyah Yasin Tahlil nurul iman rt04 RW02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
48	madrasah TPQ Darussalam RT05 RW06	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
49	Rehab masjid Baitul A'la. Jl Boegenvil RT02 RW 07 Balutan	Purwoharjo, Comal	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
50	TPQ Aisiyyah, jl Gatot Subroto gg Kenanga 5 no 12 Balutan	Purwoharjo, Comal	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
51	Musholla Nurul Iman RT05 RW 03	Kauman, Comal	Bantuan kepada yayasan/ kelompok	1 paket	



<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
			masyarakat/ ormas		
52	PAUD PR Aisyiyah RT02 RW 09 Samping Masjid Attaqwa	Purwoharjo, Comal	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
53	Musholla At Taqwa, RT04 RW 02 gg Mawar 7	Kauman, Comal	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
54	Musholla Al Ikhlas gg mawar 2 RT05 RW 01	Kauman, Comal	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
55	PR Aisyiyah Kauman Rt. 01/02	Kauman, Comal	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
56	Musholla Al Hidayah, RT03 RW 08 Ds Serdadi	Purwoharjo, Comal	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
57	Musholla Baitul Muttaqin	Gedeg, Comal	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
58	TPQ Nur Hidayah RT1 RW 7	Blendung, Comal	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
59	Mushola Al Muslimun RT01 RW 02	Limbangan, Ulujami	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
60	Yayasan Lik Sarimo Jaya Sejahtera	Banyumudal, Moga	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
61	Masjid Al Hidayah dkh Tumanggal RW 09	Banyumudal, Moga	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
62	TPQ MIFTAHUL HUDA Dukuh Nusa RT12 RW 02	Karang Sari, Pulosari	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
63	Bantuan pembangunan Mushola Al Barokah	Penggarit, Taman	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
64	Renovasi masjid Babussalam dsn danayasa	Kaligelang, Taman	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
65	Pembangunan Musholla Al Mizan RT01 RW 01	Penggarit, Taman	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
66	Bantuan keuangan utk pembelian sarana dan perlengkapan pemeliharaan dan perawatan jenazah di Rukun Kematian	Penggarit, Taman	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
67	Majlis Ta'lim Al Kausar rt04 RW02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
68	Jam'iyah Yasin Tahlil Al aAufi Rt08 RW02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
69	Jam'iyah Yasin Tahlil Nurul Ikhlas rt08 RW03	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
70	PKBM Taruna	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok	1 paket	

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
			masyarakat/ ormas		
71	Yayasan Ikhlas Bakti Bina Bangsa jl. kol Sugiono 232 Taman Pemalang	Taman, Taman	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
72	Jam'iyah Yasin Tahlil Miftahul Jannah RT02 RW 06	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
73	paguyuban sepeda onthel kendalsari (Basoke)	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
74	Jam'iyah Yasin Tahlil Sabilul Muttaqin Rt07 RW06	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
75	Jam'iyah Yasin Tahlil al ikhlas Rt.2 RW.6	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
76	Pemuda Muhammadiyah	Purwoharjo, Comal	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 Paket	
77	Harpi ranting comal	Purwoharjo, Comal	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 Paket	
78	Harpi ranting bodeh	Kelangdepok, Bodeh	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 Paket	
79	Jam'iyah Yasin Tahlil miftahul janah Rt07 RW02	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
80	Jam'iyah Yasin Tahlil Khoiron Najjah	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
81	Jam'iyah Yasin Tahlil Nahdotun Nisa	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
82	Jam'iyah Yasin Tahlil baitussalam	Kendalsari , Petarukan	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 paket	
83	Harpi Ulujami	Tasikrejo, Ulujami	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 Paket	
84	Nusadaya Amanah Indonesia Dsn Kalibaros	Taman	Bantuan kepada yayasan/ kelompok masyarakat/ ormas	1 Paket	

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026, dimana didalamnya termuat Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2019 -2024 dan memuat juga Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **3.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional**

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Visi tersebut diwujudkan melalui peleksanaan 9 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi sesegenap bangsa dan memberrikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara persatuan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong, dirumuskan tujuh agenda prioritas yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. RevolusiMental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden memberikan lima arahan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mempunyai tema **“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**, dengan fokus pembangunan, meliputi : (1) industri, (2) pariwisata, (3) ketahanan pangan, (4) UMKM, (5) infrastruktur, (6) transformasi digital, (7) pembangunan rendah karbon, (8) reformasi pembangunan sosial, (9) reformasi pendidikan dan keterampilan, serta (10) reformasi Kesehatan. Adapun focus pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

No	Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan
		2. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah
		2. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang
		3. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah
		4. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata
		5. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
		2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
		3. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
		4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
		6. Pengentasan kemiskinan
		7. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
		2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
		3. Moderasi beragama
		4. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar
		2. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		3. Pembangunan infrastruktur perkotaan
		4. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan
		5. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		2. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
		3. Pembangunan karbon rendah
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
		2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan
		3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber
		4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi
		5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

No	Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan
		6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

### 3.1.2. Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan tahun ke lima pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang diarahkan untuk **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara keberlanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Prioritas Provinsi Jateng	Fokus Pembangunan
1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara keberlanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi berbasis industri, peningkatan kualitas kelembagaan petani berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan dan subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, pengembangan kawasan pertanian/<i>food estate</i>, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan <i>database</i>, serta peningkatan prasarana dan sarana pertanian;</li> <li>2. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, peningkatan akses permodalan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui optimalisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta peningkatan kualitas prasarana sarana perikanan berbasis teknologi;</li> <li>3. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;</li> <li>4. Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal sebagai</li> </ol>

No	Prioritas Provinsi Jateng	Fokus Pembangunan
		<p>sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan padangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman serta mutu dan keamanan pangan segar;</p> <p>5. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan keperantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keperantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;</p> <p>6. Peningkatan <i>eco socio tourism</i> berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;</p> <p>7. Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel, pemberian fasilitas kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepeminatan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;</p> <p>8. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah dan pansela;</p> <p>9. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air sungai danau waduk, peningkatan tampungan air baku, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir laut, pengelolaan sampah berbasis 3Ng (<i>Ngelongi, Nggunakke dan Ngolah</i>), penerapan <i>Good Mining Practise</i>, konservasi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dengan pendekatan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim;</p> <p>10. Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dokumentasi sejarah</p>



No	Prioritas Provinsi Jateng	Fokus Pembangunan
		<p>kebencanaan, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penganggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana</p>
2	<p>Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan <i>basic need access</i> (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UKM) dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih dan listrik murah);</li> <li>2. Penguatan <i>sustainable livelihood</i> (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, utamanya melalui pendampingan dan pengembangan daya saing usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (<i>community based</i>), pengembangan aktivitas ekonomi baru berbasis pada potensi lokal, pengembangan kewirausahaan pemuda yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi digital;</li> <li>3. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keperantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal;</li> <li>4. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, pelayanan pengawasan tenaga kerja serta membangun kesatuan sistem <i>demand</i> dan <i>supply side</i> tenaga kerja.</li> </ol>
3	<p>Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan</li> </ol>

No	Prioritas Provinsi Jateng	Fokus Pembangunan
		<p>tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya dan kearifan lokal;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan serta penyelenggaraan even olahraga;</li> <li>3. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;</li> <li>4. Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.</li> </ol>
4	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif, sarana pelayanan publik yang inklusif, <i>open government</i> melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;</li> <li>2. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan pengautan sistem integritas internal instansi;</li> <li>3. Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui</li> </ol>

No	Prioritas Provinsi Jateng	Fokus Pembangunan
		<p>optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta optimalisasi peta poses bisnis pemerintahan daerah;</p> <p>4. Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;</p> <p>5. Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer dan penguatan peran BUMD.</p>

### 3.1.3. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pemalang tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Pemalang yang maju, mandiri dan sejahtera sebagai landasan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang pada saat ini telah berada pada tahap ke-5 dengan prioritas “ Pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

Adapun keselarasan prioritas pembangunan nasional yang sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

#### a. Prioritas Pembangunan Nasional :

- 1) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 2) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

#### b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah :

“Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah”

#### c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang :

Prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan tahun ke dua pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yang diarahkan untuk **“Peningkatan perekonomian daerah dan**

**kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur”, meliputi :**

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana;
2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul;
3. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19;
4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI);
5. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur;
6. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak.

Prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dijabarkan dalam tabel berikut :

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Fokus Pembangunan
1	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui peningkatan kapasitas industri kecil; peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri berbahan baku lokal; pengembangan kawasan industri Pemalang dan pengembangan industri dalam konsep Kota Industri (KOIN); serta penguatan SIINAS;</li> <li>2. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, melalui peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak dan kesehatan hewan ternak dan masyarakat veteriner; peningkatan sarana dan prasarana pertanian; peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani berbasis korporasi dan penyuluh; pengembangan kawasan pangan; fasilitasi izin usaha pertanian; dan penguatan penanganan bencana pertanian;</li> <li>3. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah lingkungan) dan produksi budidaya, peningkatan pemberdayaan nelayan tangkap dan budidaya, peningkatan kualitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI); perlindungan nelayan; serta peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI);</li> <li>4. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat untuk pencapaian pola pangan harapan; ketersediaan pangan dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan pangan keluarga, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dengan</li> </ol>

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Fokus Pembangunan
		<p>lambung pangan; pengelolaan distribusi pangan; peningkatan keanekaragaman pangan dengan konsumsi seimbang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dan keamanan pangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peningkatan perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas pasar rakyat sebagai sarana distribusi, peningkatan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> dan keperantaraan pasar (<i>market linkages</i>), peningkatan kualitas produk standar ekspor dan peningkatan perlindungan konsumen;</li> <li>6. Peningkatan peran pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan penguatan desa wisata (DEWI) dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki sebagai obyek wisata baru, peningkatan <i>event</i> pariwisata skala lokal dan regional, pengembangan jejaring pemasaran dan bekerjasana dengan sekolah di Kabupaten Pemalang, pembentukan TIC (<i>Tourism Information Center</i>), pengembangan destinasi wisata baru dan wisata virtual;</li> <li>7. Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor;</li> <li>8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan, pengawasan kualitas udara dan air, peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3R (<i>reuse, reduce, dan recycle</i>), peningkatan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Akhir (TPA), penanganan limbah B3 (sementara dan penyimpanan), pengawasan usaha/kegiatan lingkungan yang berijin, dan penguatan kelompok masyarakat;</li> <li>9. Peningkatan pelayanan penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, optimalisasi peran relawan dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana termasuk kebakaran;</li> <li>10. Peningkatan kondusivitas wilayah melalui pencegahan dan penurunan potensi konflik dan gangguan ketentraman serta ketertiban umum dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ideologi Pancasila, karakter kebangsaan, keberagaman dan politik.</li> </ol>
2	Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pemenuhan SPM bidang pendidikan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, penanganan ATS dengan program “NJUH SEKOLAH MANING”, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, peningkatan kerjasama dalam</li> </ol>

No	Prioritas Kabupaten Pematang	Fokus Pembangunan
		<p>penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan pelestarian budaya melalui pelestarian warisan budaya benda dan tak benda;</li> <li>3. Peningkatan budaya literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dengan perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan layanan perpustakaan secara digital (iPematang), peningkatan kegiatan perpustakaan pasca baca, penambahan koleksi bacaan, peningkatan pelayanan perpustakaan keliling, penyediaan pojok baca/Taman Baca Masyarakat (TBM) di Ruang Terbuka Publik (RTP) dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca;</li> <li>4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemenuhan SPM bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di fasilitas kesehatan, pembangunan fasilitas rujukan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan meningkatkan kepesertaan JKN, peningkatan perilaku hidup sehat dalam konsep keluarga sehat peningkatan partisipasi olahraga dengan penyediaan fasilitas sarana prasarana <i>sport area</i>;</li> <li>5. Pembangunan kependudukan melalui pengendalian kuantitas penduduk dengan meningkatkan partisipasi keluarga berencana (KB), meningkatkan kualitas kelembagaan (BKB, BKL, BKR), pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi dengan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), Layanan Administrasi Kependudukan Online (Lakone) dan mobil pelayanan (moyan);</li> <li>6. Peningkatan akuntabilitas pembangunan dan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang inovatif berdasarkan kebijakan manajemen resiko dan pengelolaan arsip serta peningkatan kompetensi dan <i>Merit System</i>.</li> </ol>
3	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan beban hidup masyarakat miskin ekstrem melalui penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) dengan pemberian beasiswa tingkat SD dan SMP; penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberian Jamkesda dan bantuan kepesertaan JKN PBI; penanganan kerawanan pangan; dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan pemberian bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT), pemberian jaminan dan perlindungan sosial sesuai dengan SPM bidang sosial;</li> <li>2. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem melalui peningkatan</li> </ol>

No	Prioritas Kabupaten Pematang	Fokus Pembangunan
		<p>kesempatan kerja dan keterampilan dengan memberi kemudahan investasi dan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja; peningkatan peran desa dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan pengembangan potensi desa (produk unggulan desa/prudes, Bumdes dan Bumdesma); peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil dengan pemberdayaan UMKM; peningkatan peran pemuda dalam berwirausaha dan inklusi sosial dengan pembinaan kewirausahaan pemuda dan pelatihan literasi berbasis inklusi sosial;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengurangan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan cakupan <i>universal access</i> dengan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan sumber air minum, fasilitas listrik murah, penyediaan fasilitas BAB, dan penanganan kawasan kumuh; serta peningkatan konektivitas antar wilayah dengan melaksanakan pembangunan jalan di daerah kemiskinan ekstrem;</li> <li>4. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pematang, penguatan <i>database</i> kemiskinan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat, optimalisasi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal;</li> <li>5. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi sesuai pangsa pasar; peningkatan produktivitas kerja; peningkatan kapasitas dan kuantitas BLK; peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan bursa kerja; peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui kepemilikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan), penyelesaian hubungan industrial (tripartit); dan peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjangkaran minat;</li> <li>6. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha mikro ke dalam kluster yang telah terbentuk, pendataan usaha mikro, peningkatan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, penguatan koperasi sebagai salah satu akses permodalan, dan pemberian subsidi bunga pinjaman UMKM.</li> </ol>
4	Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pematang (Sidekem) yang terintegrasi melalui penyajian dan pemanfaatan data potensi desa yang didukung keamanan sistem informasi; peningkatan digitalisasi data dan informasi desa, meliputi data kesehatan (lansia, ibu, anak, bayi), penataan wilayah, mitigasi bencana, pendidikan (anak tidak sekolah/ATS), kemiskinan (DTKS), dan regulasi desa (JDIH desa);</li> </ol>

No	Prioritas Kabupaten Pematang	Fokus Pembangunan
		<p>pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam layanan desa, meliputi layanan kesehatan (lansia, ibu, anak, bayi), mitigasi bencana, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan desa wisata;</p> <p>2. Pemberdayaan lembaga desa dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet, pemanfaatan Layanan Desa Mandiri (LDM), aplikasi kependudukan Lakone, layanan desa wisata digital; peningkatan pemanfaatan <i>website</i> desa dan media sosial desa, serta fasilitasi menuju Desa Pintar (<i>smart village</i>);</p> <p>3. Peningkatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik difokuskan pada integrasi sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring, implementasi 6 pilar <i>smart city</i>, peningkatan keterbukaan informasi publik;</p> <p>4. Peningkatan pelayanan publik yang didekatkan ke masyarakat melalui pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.</p>
5	Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur	<p>1. Pengembangan kota kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik dan konektivitas komunikasi antar wilayah;</p> <p>2. Peningkatan konektivitas melalui pembangunan, pemeliharaan dan rehab jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata; peningkatan jalan antar desa menjadi jalan kabupaten; peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan;</p> <p>3. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS).</p>
6	Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil <i>gender</i> dan ramah anak	<p>1. Peningkatan kualitas perencanaan responsif <i>gender</i> (PUG), penguatan <i>database</i> <i>gender</i> dan anak, dan penguatan kelembagaan penanganan kekerasan perempuan dan anak;</p> <p>2. Peningkatan pendapatan perempuan rentan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan, dan peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;</p> <p>3. Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta perwujudan kabupaten layak anak.</p>

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten, Sekretariat Daerah Kabupaten dengan tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, diharapkan bisa memegang peran dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Peran Sekretariat Daerah dalam fungsi koordinatif perangkat daerah menjadi sebuah hal yang sangat strategis dalam mengarahkan kebijakan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Mendasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, Sekretariat Daerah memiliki keterkaitan dengan Misi Kabupaten Pemalang kedua yaitu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”**. Keterkaitan tersebut berlandaskan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang. Dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Secara rinci Tujuan dan Sasaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sbb. :

#### **Tujuan :**

Mendasarkan pada Rencana Strategis Setda Kabupaten Pemalang 2021-2026, tujuan dari Setda Kabupaten Pemalang adalah **Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengedepankan prinsip Good governance.**

#### **Sasaran :**

Mendasarkan tujuan yang dipilih, sasaran Setda Kabupaten Pemalang dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra;
- 2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- 3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Administrasi Umum.

### 3.3 Program dan kegiatan

Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan pelaksanaan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang dilakukan melalui pemenuhan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Pemilihan program dan kegiatan ini diharapkan bisa berperan signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setda untuk mencapai target kinerja pembangunan, baik yang tercantum dalam RPJMD, Renstra, maupun indikator kinerja lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 mengacu pada Renstra Perangkat Daerah serta RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebanyak 3 program, 20 kegiatan dan 68 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 58.484.277.000,00 (lima puluh delapan milyar

empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Program dan kegiatan tersebut diampu oleh 9 (sembilan) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1) **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Mebel
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
  - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
  - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- k. Penataan Organisasi
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
  - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
  - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- l. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Fasilitasi Keprotokolan
  - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
  - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 2) **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
- a. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
  - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
  - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- b. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
  - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
  - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
- c. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
  - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
  - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

- d. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
  - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
  - a. Administrasi Tata Pemerintahan
    - Penataan Administrasi Pemerintahan
    - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
    - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
  - b. Fasilitasi Kerjasama Daerah
    - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
    - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
  - c. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
    - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
    - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
    - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
  - d. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
    - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
    - Fasilitasi Bantuan Hukum
    - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang tahun 2023 dan Perkiraan Maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini :

**Tabel 3.3**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang**

**Nama Perangkat Daerah :** Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>4.01</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>			<b>73</b>	<b>58.484.277.000</b>			<b>73,7</b>	<b>58.484.277.000</b>		
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Administrasi Umum</b>	<b>Persentase terwujudnya peningkatan nilai penyelenggaraan pemerintahan urusan administrasi umum</b>		<b>58,37</b>	<b>38.848.268.212</b>		<b>58,77</b>	<b>38.848.268.212</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>		<b>82,6</b>	<b>135.364.976</b>		<b>82,7</b>	<b>135.364.976</b>
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	45.000.000		6 Dokumen	45.000.000
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.364.976		2 Dokumen	40.364.976
4	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	50.000.000		3 Laporan	50.000.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,01</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>		<b>82,6</b>	<b>22.430.098.000</b>		<b>82,7</b>	<b>22.430.098.000</b>

NO					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	2,01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		174 orang	22.161.328.000			174 orang	22.161.328.000
4	01	01	2,02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian atau verifikasi SKPD		200 Dokumen	250.000.000			200 Dokumen	250.000.000
4	01	01	2,02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 laporan	11.070.000			1 laporan	11.070.000
4	01	01	2,02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan atau triwulan atau semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran SKPD		1 Laporan	7.700.000			1 Laporan	7.700.000
4	01	01	2,02	05	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>		<b>82,6</b>	<b>9.000.000</b>			<b>82,7</b>	<b>9.000.000</b>
4	01	01	2,02	07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD		20 Laporan	9.000.000			20 Laporan	9.000.000
4	01	01	2,03		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>		<b>82,6</b>	<b>466.897.000</b>			<b>82,7</b>	<b>466.897.000</b>

NO					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		4 paket	150.000.000			4 paket	150.000.000
4	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		2 Dokumen	10.652.000			2 Dokumen	10.652.000
4	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan		50 orang	252.985.000			50 orang	252.985.000
4	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan		13 orang	53.260.000			13 orang	53.260.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>		<b>82,6</b>	<b>2.191.191.560</b>			<b>82,7</b>	<b>2.191.191.560</b>
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 paket	202.388.000			5 paket	202.388.000
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12 paket	55.000.000			12 paket	55.000.000
4	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		12 paket	53.260.000			12 paket	53.260.000
4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12 paket	39.930.000			12 paket	39.930.000

NO					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		12 paket	125.575.260			12 paket	125.575.260
4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		9 Dokumen	205.848.300			9 Dokumen	205.848.300
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		14 Laporan	499.990.000			14 Laporan	499.990.000
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		1200 laporan	1.009.200.000			1200 laporan	1.009.200.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>		<b>82,6</b>	<b>519.580.000</b>			<b>82,7</b>	<b>519.580.000</b>
4	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		9 unit	91.320.000			9 unit	91.320.000
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang tersedia		200 unit	202.635.000			200 unit	202.635.000
4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan		250 unit	225.625.000			250 unit	225.625.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>		<b>82,6</b>	<b>4.455.422.700</b>			<b>82,7</b>	<b>4.455.422.700</b>



NO					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	54.293.000			12 Laporan	54.293.000
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik dan air yang disediakan		12 Laporan	1.357.000.000			12 Laporan	1.357.000.000
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	737.367.200			4 Laporan	737.367.200
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan	2.306.762.500			12 Laporan	2.306.762.500
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>		<b>82,6</b>	<b>1.998.531.000</b>			<b>82,7</b>	<b>1.998.531.000</b>
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		6 unit	169.693.000			6 unit	169.693.000
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		150 unit	700.000.000			150 unit	700.000.000
4	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		50 unit	105.000.000			50 unit	105.000.000

NO					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 unit	851.838.000			10 unit	851.838.000
4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	172.000.000			10 Unit	172.000.000
4	01	01	2,11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>		82,6	1.123.818.000			82,7	1.123.818.000
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/bula	785.318.000			2 Orang/bula	785.318.000
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		12 Paket	250.000.000			12 Paket	250.000.000
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti medikal cek up Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah		2 orang	88.500.000			2 orang	88.500.000
4	01	01	2,12		<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>		82,6	3.848.952.661			82,7	3.848.952.661

NO					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan		12 paket	1.883.690.811			12 paket	1.883.690.811
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan		12 paket	1.165.261.850			12 paket	1.165.261.850
4	01	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan		12 paket	800.000.000			12 paket	800.000.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,13</b>		<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Indeks Organisasi</b>		<b>1,612</b>	<b>1.066.662.000</b>			<b>1,734</b>	<b>1.066.662.000</b>
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2 Dokumen	330.000.000			2 Dokumen	330.000.000
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		2 Laporan	230.839.000			2 Laporan	230.839.000
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	220.206.000			2 Dokumen	220.206.000
4	01	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		2 Dokumen	115.411.000			2 Dokumen	115.411.000

NO					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	2,13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1 Dokumen	170.206.000			1 Dokumen	170.206.000
4	01	01	2,14		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase terlaksananya fasilitas keprotokolan dan komunikasi pimpinan</b>		92	602.750.315			93	602.750.315
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12 Laporan	161.956.400			12 Laporan	161.956.400
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12 Laporan	96.570.915			12 Laporan	96.570.915
4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12 Laporan	344.223.000			12 Laporan	344.223.000
4	01	03			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana</b>		68,4	2.416.074.015			69,13	2.416.074.015
4	01	03	2,02		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi pembangunan daerah</b>		66,08	540.204.015			68,08	540.204.015
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		3 Laporan	163.809.698			3 Laporan	163.809.698

NO					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		4 Laporan	376.394.317			4 Laporan	376.394.317
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2,01</b>		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah</b>		<b>78</b>	<b>573.650.000</b>			<b>78,2</b>	<b>573.650.000</b>
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		4 Dokumen	275.000.000			4 Dokumen	275.000.000
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		8 Laporan	200.000.000			8 Laporan	200.000.000
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		2 Dokumen	98.650.000			2 Dokumen	98.650.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2,04</b>		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan SDA</b>		<b>78</b>	<b>202.220.000</b>			<b>78,2</b>	<b>202.220.000</b>

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11				
4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, perikanan dan pertanian, dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal dan tenaga kerja		12 dokumen	84.220.000			12 dokumen	84.220.000
4	01	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik		4 dokumen	59.000.000			4 dokumen	59.000.000
4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan		6 dokumen	59.000.000			6 dokumen	59.000.000
4	01	03	2,03		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa</b>		<b>61,11</b>	<b>1.100.000.000</b>			<b>61,11</b>	<b>1.100.000.000</b>
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		50 Dokumen	500.000.000			50 Dokumen	500.000.000

NO					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		4 Dokumen	400.000.000			4 Dokumen	400.000.000
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		8 orang	200.000.000			8 orang	200.000.000
4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana</b>		<b>92,27</b>	<b>17.219.934.773</b>			<b>93,13</b>	<b>17.219.934.773</b>
4	01	02	2,01		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi pemerintahan</b>		<b>100</b>	<b>374.567.904</b>			<b>100</b>	<b>374.567.904</b>
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		1 Dokumen	85.824.048			1 Dokumen	85.824.048
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		4 Dokumen	101.864.976			4 Dokumen	101.864.976
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Laporan	186.878.880			3 Laporan	186.878.880
4	01	02	2,02		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat</b>		<b>92,4</b>	<b>15.332.600.869</b>			<b>92,6</b>	<b>15.332.600.869</b>

NO					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		4 Dokumen	14.789.713.965			4 Dokumen	14.789.713.965
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		4 Dokumen	417.725.904			4 Dokumen	417.725.904
4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		4 Dokumen	125.161.000			4 Dokumen	125.161.000
4	01	02	2,03		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat</b>		84,4	1.262.766.000			86,8	1.262.766.000
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		12 Dokumen	343.428.000			12 Dokumen	343.428.000



NO					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		2 kasus	475.565.550			2 kasus	475.565.550
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		4 Dokumen	443.772.450			4 Dokumen	443.772.450
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2,04</b>		<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya fasiltasi kerjasama dan sinergi daerah</b>		<b>100</b>	<b>250.000.000</b>			<b>100</b>	<b>250.000.000</b>
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1 Dokumen	165.000.000			1 Dokumen	165.000.000
4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1 Dokumen	60.000.000			1 Dokumen	60.000.000
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		4 Laporan	25.000.000			4 Laporan	25.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam menjalankan kegiatan untuk memenuhi target kinerja, Perangkat Daerah membutuhkan rencana kerja dan rencana pendanaan. Rencana kerja digunakan sebagai pedoman dan menjaga agar organisasi tetap berjalan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan, dan pendanaan timbul sebagai dampak atas dilaksanakannya kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu, dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berikut ini akan disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah untuk Tahun 2023. Penyusunan rencana kerja berdasarkan target capaian Indikator Kinerja Utama Setda Kabupaten Pematang Jaya.

**Tabel 4.1**

**Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pematang Tahun 2023**

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
1.	<b>Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengedepankan prinsip Good governance</b>			Persentase terwujudnya peningkatan kinerja pemerintahan di bidang Administrasi Umum, Perekonomian dan Pembangunan, serta Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	73	58.484.277.000	73,7	58.484.277.000	Setda
		<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Administrasi Umum</b>		Persentase penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Administrasi Umum	58,37	38.848.268.212	58,77	38.848.268.212	Bag. Organisasi , Bagian Prokompim, Bagian Umum

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			<b>Administrasi Umum</b>	Persentase terwujudnya peningkatan nilai penyelenggaraan pemerintahan urusan administrasi umum	<b>58,37</b>	38.848.268.212	<b>58,77</b>	38.848.268.212	
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup secretariat</b>	<b>82,6</b>	135.364.976	<b>82,7</b>	135.364.976	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	45.000.000	6 Dokumen	45.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40.364.976	2 Dokumen	40.364.976	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup secretariat</b>	<b>82,6</b>	22.430.098.000	<b>82,7</b>	22.430.098.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	174 orang	22.161.328.000	174 orang	22.161.328.000	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian atau verifikasi SKPD	200 Dokumen	250.000.000	200 Dokumen	250.000.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	11.070.000	1 laporan	11.070.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan atau triwulan atau semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran SKPD	1 Laporan	7.700.000	1 Laporan	7.700.000	
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>9.000.000</b>	<b>82,7</b>	<b>9.000.000</b>	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	20 Laporan	9.000.000	20 Laporan	9.000.000	
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>466.897.000</b>	<b>82,7</b>	<b>466.897.000</b>	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4 paket	150.000.000	4 paket	150.000.000	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 Dokumen	10.652.000	2 Dokumen	10.652.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang – undangan	50 orang	252.985.000	50 orang	252.985.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	13 orang	53.260.000	13 orang	53.260.000	
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>2.191.191.560</b>	<b>82,7</b>	<b>2.191.191.560</b>	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	202.388.000	5 paket	202.388.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	55.000.000	12 paket	55.000.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	53.260.000	12 paket	53.260.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	39.930.000	12 paket	39.930.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	125.575.260	12 paket	125.575.260	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9 Dokumen	205.848.300	9 Dokumen	205.848.300	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	14 Laporan	499.990.000	14 Laporan	499.990.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1200 laporan	1.009.200.000	1200 laporan	1.009.200.000	
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup secretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>519.580.000</b>	<b>82,7</b>	<b>519.580.000</b>	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	9 unit	91.320.000	9 unit	91.320.000	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang tersedia	200 unit	202.635.000	200 unit	202.635.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan	250 unit	225.625.000	250 unit	225.625.000	
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup secretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>4.455.422.700</b>	<b>82,7</b>	<b>4.455.422.700</b>	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	54.293.000	12 Laporan	54.293.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik dan air yang disediakan	12 Laporan	1.357.000.000	12 Laporan	1.357.000.000	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	737.367.200	4 Laporan	737.367.200	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.306.762.500	12 Laporan	2.306.762.500	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup secretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>1.998.531.000</b>	<b>82,7</b>	<b>1.998.531.000</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	169.693.000	6 unit	169.693.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	150 unit	700.000.000	150 unit	700.000.000	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	50 unit	105.000.000	50 unit	105.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	851.838.000	10 unit	851.838.000	



NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana  Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	172.000.000	10 Unit	172.000.000	
			<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup secretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>1.123.818.000</b>	<b>82,7</b>	<b>1.123.818.000</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bula	785.318.000	2 Orang/bula	785.318.000	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	250.000.000	12 Paket	250.000.000	
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti medikal cek up Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	2 orang	88.500.000	2 orang	88.500.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup secretariat</b>	<b>82,6</b>	<b>3.848.952.661</b>	<b>82,7</b>	<b>3.848.952.661</b>	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 paket	1.883.690.811	12 paket	1.883.690.811	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 paket	1.165.261.850	12 paket	1.165.261.850	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	12 paket	800.000.000	12 paket	800.000.000	
			<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Indeks Organisasi</b>	<b>1,612</b>	<b>1.066.662.000</b>	<b>1,734</b>	<b>1.066.662.000</b>	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	330.000.000	2 Dokumen	330.000.000	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	230.839.000	2 Laporan	230.839.000	
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	220.206.000	2 Dokumen	220.206.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	115.411.000	2 Dokumen	115.411.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	170.206.000	1 Dokumen	170.206.000	
			<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase terlaksananya fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan</b>	<b>92</b>	<b>602.750.315</b>	<b>93</b>	<b>602.750.315</b>	
			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	161.956.400	12 Laporan	161.956.400	
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	96.570.915	12 Laporan	96.570.915	
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	344.223.000	12 Laporan	344.223.000	
			<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>68,4</b>	<b>2.416.074.015</b>	<b>69,13</b>	<b>2.416.074.015</b>	<b>Bag Adpemb, Bag. Perekonomian, Bag. PBJ</b>

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana</b>	<b>68,4</b>	<b>2.416.074.015</b>	<b>69,13</b>	<b>2.416.074.015</b>	
			<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi pembangunan daerah</b>	<b>66,08</b>	<b>540.204.015</b>	<b>68,08</b>	<b>540.204.015</b>	
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	163.809.698	3 Laporan	163.809.698	
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	376.394.317	4 Laporan	376.394.317	
			<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah</b>	<b>78</b>	<b>573.650.000</b>	<b>78,2</b>	<b>573.650.000</b>	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	275.000.000	4 Dokumen	275.000.000	
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8 Laporan	200.000.000	8 Laporan	200.000.000	
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	98.650.000	2 Dokumen	98.650.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan SDA</b>	<b>78</b>	<b>202.220.000</b>	<b>78,2</b>	<b>202.220.000</b>	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, perikanan dan pertanian, dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal dan tenaga kerja	12 dokumen	84.220.000	12 dokumen	84.220.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik	4 dokumen	59.000.000	4 dokumen	59.000.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	6 dokumen	59.000.000	6 dokumen	59.000.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa</b>	<b>61,11</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>61,11</b>	<b>1.100.000.000</b>	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 Dokumen	500.000.000	50 Dokumen	500.000.000	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	400.000.000	4 Dokumen	400.000.000	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	8 orang	200.000.000	8 orang	200.000.000	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra		Persentase penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra	92,27	17.219.934.773	93,13	17.219.934.773	Bag Tapem, Bag. Kesra, Bag. Hukum
			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana</b>	<b>92,27</b>	<b>17.219.934.773</b>	<b>93,13</b>	<b>17.219.934.773</b>	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>374.567.904</b>	<b>100</b>	<b>374.567.904</b>	
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	85.824.048	1 Dokumen	85.824.048	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	101.864.976	4 Dokumen	101.864.976	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Laporan	186.878.880	3 Laporan	186.878.880	
			<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>92,4</b>	<b>15.332.600.869</b>	<b>92,6</b>	<b>15.332.600.869</b>	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	14.789.713.965	4 Dokumen	14.789.713.965	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	417.725.904	4 Dokumen	417.725.904	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	125.161.000	4 Dokumen	125.161.000	
			<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat</b>	<b>84,4</b>	<b>1.262.766.000</b>	<b>86,8</b>	<b>1.262.766.000</b>	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	12 Dokumen	343.428.000	12 Dokumen	343.428.000	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 kasus	475.565.550	2 kasus	475.565.550	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dokumen	443.772.450	4 Dokumen	443.772.450	
			<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya fasilitasi kerjasama dan sinergi daerah</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>	



NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	165.000.000	
			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2021, Sekretariat Daerah memiliki fungsi utama melaksanakan koordinatif dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, menjadikannya sebuah institusi strategis dalam mengendalikan jalannya pemerintahan di Kabupaten Pemalang.

Oleh karena itu, sebagai dukungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memerlukan dukungan anggaran pendanaan yang memadai. Dokumen Renja ini menjadi hal yang sangat penting, sebagai acuan dan pedoman dalam implementasi kinerja perangkat daerah yang dituangkan dalam dokumen RKA maupun DPA, mengingat didalamnya tercantum serangkaian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

#### 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renja memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut masih bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran serta kemampuan keuangan daerah yang tersedia.

Selain itu, konsistensi penerapan indikator juga harus tetap dijaga sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Renstra, sehingga keterukuran kinerja dapat terlihat jelas sebagai tolok ukur kunci keberhasilan pencapaian maupun evaluasi kinerja organisasi pada masa mendatang.

#### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 yang akan terwujud dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023.

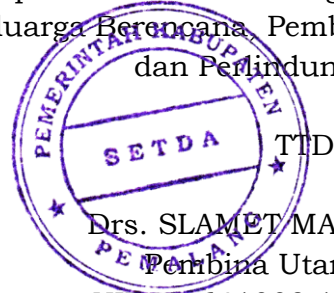
Upaya antisipatif dan mengatasi permasalahan lainnya dilakukan dengan optimalisasi, efisiensi, dan efektifitas anggaran dengan tetap mengedepankan pencapaian output maupun *outcome* dari setiap program dan kegiatan. Selain itu, upaya pemilihan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan juga menjadi bagian dari strategi penyelesaian apabila terjadi ketidakcukupan penyediaan anggaran. Koordinasi lintas sektoral merupakan kunci keberhasilan untuk mewujudkan tujuan organisasi, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus tetap mengedepankan hal tersebut.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 ini masih belum sempurna. Sehingga kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami perlukan guna perbaikan dokumen tersebut. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam waktu satu tahun kedepan.

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak



Drs. SLAMET MASDUKI, M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641003 199303 1 006